



**PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN**

BerAKHLAK #bangga
berorientasi Pelayanan | Akuntabel | Kompeten
Harmonis | Loyal | Adaptif | Kolaboratif
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025



Komplek Perkantoran Gn. Kembang,
Sarolangun



pn-sarolangun.go.id



0745-91006



[PN_Sarolangun](https://www.instagram.com/PN_Sarolangun)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal telah diamanatkan dalam inpres no. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Akip). Karakteristik penting dalam konsep Good Governance adalah akuntabilitas. Ide dasar akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut. Secara umum organisasi atau institusi harus akuntabel dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan. Dalam konsep ini pengelolaan suatu organisasi tidak hanya berhenti sampai pada proses perencanaan namun dilanjutkan sampai pada tingkat operasi pengawasan, serta pengukuran kinerja.

Pada lingkungan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun selama satu tahun yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun disamping memenuhi kewajiban tersebut Laporan ini juga merupakan kebutuhan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Indikator kinerja utama sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok badan peradilan tingkat pertama digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja instansi. Hasil yang dicapai dari pengukuran tersebut merupakan representasi dari akuntabilitas kinerja instansi Pengadilan Negeri Sarolangun. Dalam laporan kinerja ini ditunjukkan adanya proses perencanaan, pelaksanaan kinerja yang didukung kebijakan dari pimpinan, serta pengukuran hasil kinerja. Dukungan tidak hanya berupa kebijakan akan tetapi dukungan dana dari APBN dalam bentuk alokasi DIPA yang diperuntukkan dalam rangka penyelesaian perkara pidana, maupun untuk operasional dan pemeliharaan kantor. Oleh karena itu dalam laporan ini juga disampaikan hasil pelaksanaan anggaran DIPA dalam bentuk persentase realisasi DIPA sebagai bentuk akuntabilitas kinerja anggaran.

Laporan ini menyajikan perbandingan antara sasaran-sasaran yang ditargetkan diperbandingkan dengan hasil kerja/ realisasi yang diukur pada akhir tahun sehingga secara keseluruhan terlihat kinerja yang telah dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun.

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
NO	KINERJA UTAMA				
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive, dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	99%	104%
		b. Persentase penyediaan/ Pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat Pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
		c. Persentase Pengiriman Pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	50%	100%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	29%	30%	102%
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%	6%	101%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	65%	67%	103%
		j. Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-	100%	100%	100%

		Berpadu)			
		i. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I					101%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9	3,97	102%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II					102%
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	a. Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	82	82	100%
		b. Nilai indicator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 01	95	97	102%
		c. Nilai indicator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 03	95	97	102%
		c. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 01	95	100	105%
		d. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 03	85	85	100%
		d. Nilai indicator pengelolaan asset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III					102%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SECARA KESELURUHAN					102%

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 berasal dari DIPA, Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP DIPA-

005.01.477374/2025 dengan Pagu sebesar Rp. 5.165.940.000,- dan DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan Nomor DIPA : SP DIPA- 005.03.2.477375/2025 dengan PAGU sebesar Rp. 130.812.000,-

Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai berikut.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa pendapatan Negara bukan pajak : BUA PNBP Rp 18.255.650 Realisasi belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp 5.075.566.423 atau mencapai 98,25 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 5.165.940.000

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 03

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa pendapatan Negara bukan pajak : BADILUM Rp 7.807.500 Realisasi belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp. 125.901.538 atau mencapai 96,25 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 130.812.000. Melalui LKJIP Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan RENSTRA Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025-2029.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi dengan cara menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu, mengalokasikan dana untuk kegiatan yang prioritas merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.

Dengan demikian secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.